

Nanang Kristanto

**DESAIN KURIKULUM KURSUS DAN PELATIHAN KOMPUTER
(APLIKASI PERKANTORAN) PADA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
(SKB) UNTUK MENINGKATKAN MUTU LULUSAN
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Oleh : Nanang Kristanto

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Papua / Sps UPI
nanang.kristanto@kemdikbud.go.id

Rusman

Kaprodi Pengembangan Kurikulum Sps UPI
rusman821971@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi pendahuluan atas masalah dan keresahan yang muncul pada kursus dan pelatihan komputer pada sanggar kegiatan belajar. Dengan beralih fungsinya SKB menjadi satuan pendidikan maka menjadi tantangan baru dalam dunia pendidikan Non-formal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kursus dan pelatihan di SKB serta mencari solusinya. Dalam kegiatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Research and Development (R & D)*. Prosedur pada penelitian mengacu pada perdirjen PAUD dan Dikmas . Dalam penelitian ini ditempuh tiga langkah yaitu 1).studi pendahuluan,2).pengembangan desain,3).validasi. Dari hasil studi pendahuluan didapat bahwa lulusan kursus dan pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) mutu lulusannya rendah, hal tersebut dibuktikan dengan sedikitnya kepemilikan sertifikat kompetensi yang terakreditasi. Data menunjukan hanya sebesar 1,21% dari total peserta kursus yang mengikuti ujian kompetensi/profesi. Fakta tersebut diperkuat dengan keterserapan lulusan pada dunia usaha dan dunia industri yang rendah. Data nasional menunjukkan bahwa kursus dan pelatihan komputer menempati urutan pertama dengan jumlah terbanyak lulusan yang masih menunggu penempatan/mengggur. Belum terakreditasinya sanggar kegiatan belajar serta perubahan alih fungsi SKB menjadi satuan pendidikan menjadi permasalahan selanjutnya yang mengakibatkan rendahnya mutu lulusan. untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pengembangan desain kurikulum kursus dan pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) untuk meningkatkan mutu lulusan pada sanggar kegiatan belajar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya pengembangan desain kurikulum Penelitian ini hanya mengembangkan produk berupa desain kurikulum pelatihan secara teoritis saja, tidak sampai pada uji coba empirik.

Kata kunci : Desain, kurikulum, kursus dan pelatihan, mutu lulusan, SKB

PENDAHULUAN

Pergeseran kebutuhan pendidikan dari kebutuhan akan pengetahuan menjadi kebutuhan akan ketrampilan, menjadi awal baru dalam dunia pendidikan. Perubahan pola pendidikan yang begitu cepat dan silih

berganti serta globalisasi di segala bidang termasuk bidang pendidikan mengakibatkan hasil pendidikan yang diperoleh disekolah (pendidikan formal) menjadi tidak sesuai lagi dengan tuntutan baru kebutuhan dunia

Nanang Kristanto

kerja, dunia industri, karna pada dasarnya seseorang menempuh pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau membangun wirausaha. Kebutuhan masyarakat akan ketrampilan tidak didapatkan disekolah, melainkan di luar sekolah. Pendidikan luar sekolah atau yang kita kenal dengan Pendidikan Non-formal dan Infomal (PNF) mampu memberikan layanan pendidikan ketrampilan bagi semua orang tanpa mengenal batas usia dan status sosial. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar [pendidikan formal](#) yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Salah satu bentuk layanan PNF sesuai dengan undang undang sisdiknas adalah Pendidikan Kursus dan pelatihan. UU NO 20 Th 2003, Pasal 26 disebutkan bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya kursus dan pelatihan

dilaksanakan oleh pemerintah melalui lembaga pemerintah dan swasta. Pada lembaga pemerintah terutama diselenggarakan oleh sanggar kegiatan belajar (SKB) dan lembaga swasta diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan non-formal yang lainnya.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen PAUD dan Dikmas kepada seluruh Kepala Daerah dengan surat nomor : 1086/C.C4.I/PR/2015 tertanggal 3 Juli 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk mengubah fungsi sanggar kegiatan belajar (SKB) menjadi satuan pendidikan non-formal sejenis. Yang kemudian diikuti dengan di tandatanganinya Permendikbud No 4 Tahun 2016 tentang pedoman alih ungsi sanggar kegiatan belajar menjadi satuan pendidikan non-formal oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, status SKB menjadi sama dengan LKP atau satuan pendidikan non-formal lainnya, yaitu sama-sama menjadi satuan pendidikan non-formal. Yang membedakan antara SKB dengan satuan pendidikan non-formal lainnya adalah SKB merupakan satuan pendidikan non-formal Negeri. Salah satu fungsi SKB alih fungsi menjadi satuan pendidikan adalah menjadi penyelenggaraan program percontohan pendidikan non-formal. Maka diharapkan SKB menjadi contoh bagi satuan

pendidikan yang lain nya dalam menyelenggarakan program-program pendidikan, salah satunya program kursus dan pelatihan.

Dengan adanya perubahan alih fungsi SKB sesuai Permendikbud nomor 4 Tahun 2016 menjadi satuan pendidikan non-formal sejenis memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan non-formal. Sesuai dengan pasal 1 bahwa SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan non-formal sejenis yang menyelenggarakan program pendidikan non-formal. Dimana Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui :

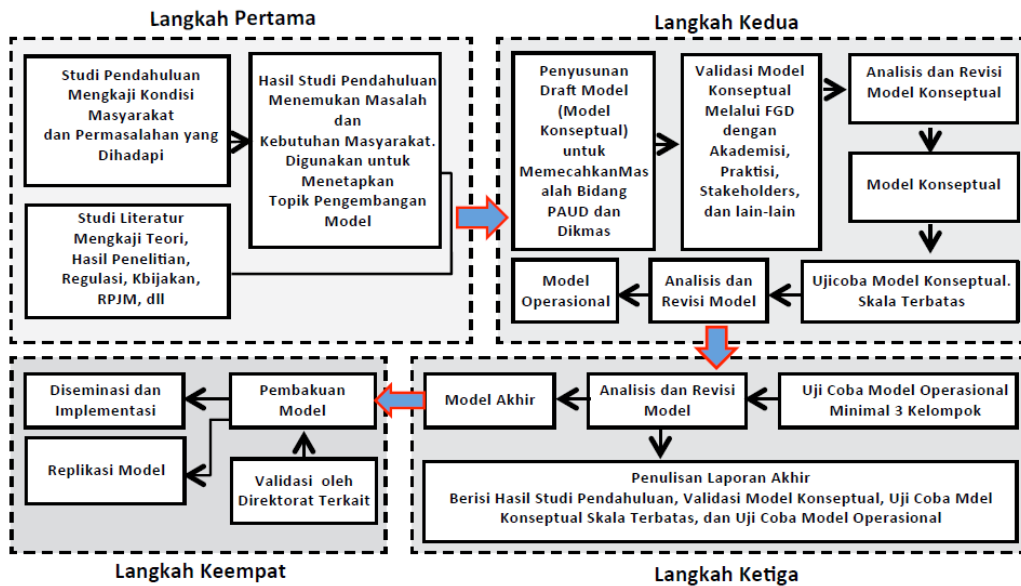
- 1) pendidikan kecakapan hidup,
- 2) pendidikan anak usia dini,
- 3) pendidikan kepemudaan,
- 4) pendidikan pemberdayaan perempuan,
- 5) pendidikan keaksaraan,
- 6) pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
- 7) pendidikan kesetaraan,
- 8) pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Salah satu bentuk pendidikan yang diselenggarakan oleh SKB adalah kursus dan pelatihan. menjadi menarik ketika sekarang SKB beralih fungsi menjadi satuan pendidikan non-formal.

rangkaian penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Rangkaian penelitian yang dimaksud penulis adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development*). Metode penelitian dan pengembangan (*Research and Development*) didasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh Van den Akker (2006: 3-5). Namun pada pelaksanaannya penelitian metode R&D mengikuti konsep yang dielaskan oleh Borg & Gall, sedangkan prosedur penelitian mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan no 2 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pengembangan model pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

METODE

Artikel ini adalah bagian dari



Terdapat empat langkah dalam prosedur penelitian dan pengembangan (*Research and Development*). Namun dalam artikel ini merupakan bagian dari analisis awal. Yang dalam bagan tersebut diatas merupakan langkah pertama. Langkah pertama yang dimaksud adalah studi pendahuluan untuk mengkaji kondisi dan permasalahan yang sebenarnya dilapangan terkait dengan kursus komputer aplikasi perkantoran. Sehingga hasil akhir akan dikembangkan produk yang tepat berdasarkan dari hasil studi pendahuluan ini. Dalam proses nya studi pendahuluan ini menggunakan metode FGD serta studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya perubahan alih fungsi SKB sesuai Permendikbud nomor 4 Tahun 2016 menjadi satuan pendidikan non-formal

sejenis memiliki tugas dan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan non-formal. Sesuai dengan pasal 1 bahwa SKB adalah unit pelaksana teknis dinas yang menangani urusan pendidikan pada kabupaten/kota yang berbentuk satuan pendidikan non-formal sejenis yang menyelenggarakan program pendidikan non-formal. Dimana Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui : 1) pendidikan kecakapan hidup, 2) pendidikan anak usia dini, 3) pendidikan kepemudaan, 4) pendidikan pemberdayaan perempuan, 5) pendidikan keaksaraan, 6) pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, 7) pendidikan kesetaraan, 8) pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Selama ini kursus dan pelatihan banyak diselenggarakan oleh LKP sedangkan

Nanang Kristanto

SKB sebelum alih fungsi menjadi satuan pendidikan non-fomal lebih banyak menyelenggarakan program dari pemerintah sesuai dengan bentuk bantuan yang didapat, walaupun dalam perencanaannya juga berdasarkan kebutuhan dilapangan. Perkembangan kursus dan pelatihan berkaitan erat dengan perkembangan LKP, Perkembangan keberadaan LKP di Indonesia sangat luar biasa, berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan bahwa data LKP tahun 2007 sebanyak 9.642 lembaga, sedangkan data tahun 2010 meningkat tajam menjadi 14.315, tahun 2015 menjadi 17.776 dan tahu ini menjadi 19.794. artinya dalam kurun waktu hanya 5 tahun meningkat sebesar 56,5%, dengan beraneka ragam keterampilan, saat ini ada 224 jenis keterampilan dan dari 224 tersebut 76 jenis keterampilan sudah dibakukan.

Fenomena peningkatanya jumlah lembaga kursus ini sayangnya belum diiringi dengan peningkatan mutu kursus dan pelatihan yang ditandai dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman serta sesuai dengan standar minimal yang telah ditentukan oleh pemerintah. (Dirjen PAUD dan Dikmas: Saatnya Lembaga Kursus Berbenah, 2015) Pada Tahun

2015 Sebanyak 17.776 Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang ada di Indonesia baru berjumlah delapan persen saja yang telah mendapatkan akreditasi dari pemeritah. Jika dihitung jumlahnya sekitar 1.200-an LKP yang mendapatkan akreditasi. 17.776 LKP tersebut terdiri dari 24 ribu macam kursus dari 97 jenis kursus.

Fungsi LKP harusnya mampu memberikan pendampingan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi, bersertifikat dan masuk dunia kerja atau berwirausaha. Sayangnya kualitas layanan yang diberikan oleh LKP tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan yang ditulis Ginting dalam Info Kursus, hasil penilaian kinerja tahun 2009 dan 2010 berkinerja A (1,7%), B (20,3%), C (35,7%) dan D (42,3%). Dari data tersebut di atas berarti bahwa keberadaan kursus yang kurang memenuhi standar atau berkinerja D masih lebih banyak, sementara berkinerja sangat baik atau A ternyata masih sangat sedikit. Pada Tahun 2016 hasil penilaian kinerja dari 749 lembaga yang dinilai kinerjanya, yang berkinerja A (2,1%), B (22,6 %), C (34,8%) dan D (40,5%). Penilaian kinerja bagi LKP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memetakan serta dapat fokus membina secara berkesinambungan pada LKP sesuai

dengan kebutuhan berdasarkan penilaian kinerja yang diperolehnya, sehingga akan berdampak pada kualitas layanan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan.

Mutu lulusan juga dapat dilihat dari jumlah peserta didik yang lulus. Berdasarkan data informasi eksekutif dalam www.infokursus.net berikut merupakan rekapitulasi status lulusan LKP

Tabel 1. Rekapitulasi Status Kelulusan program Kursus di LKP

Status	Jumlah	
Proses Pendidikan & Pelatihan	20.182	13.11 %
Bekerja	70.338	45.68 %
Usaha Mandiri	14.283	9.28 %
Menunggu Penempatan / Menganggur	49.168	31.93 %
Total	153.971	100 %

Sumber: www.infokursus.net (diakses 28/03/17)

Nanang Kristanto

Kondisi status lulusan tersebut dapat diartikan bahwa masih banyak lulusan kursus dan pelatihan yang menunggu penempatan/menganggur. Banyaknya lulusan kursus yang menunggu penempatan / menganggur mengindikasikan bahwa lulusan kursus belum memenuhi standart kompetensi. Berkompeten atau tidak nya lulusan kursus dan pelatihan dibuktikan dengan lulus tidaknya peserta kursus mengikuti ujian. Secara legal formal peserta kursus akan mendapatkan sertifikat atau ijazah baik itu di akui oleh Lokal, Nasional dan Internasional. Jika disimpulkan dari data lulusan, terutama terkait dengan kompetensi lulusan kursus dan pelatihan, dapat dinyatakan bahwa kompetensi lulusan kursus dan pelatihan itu rendah.

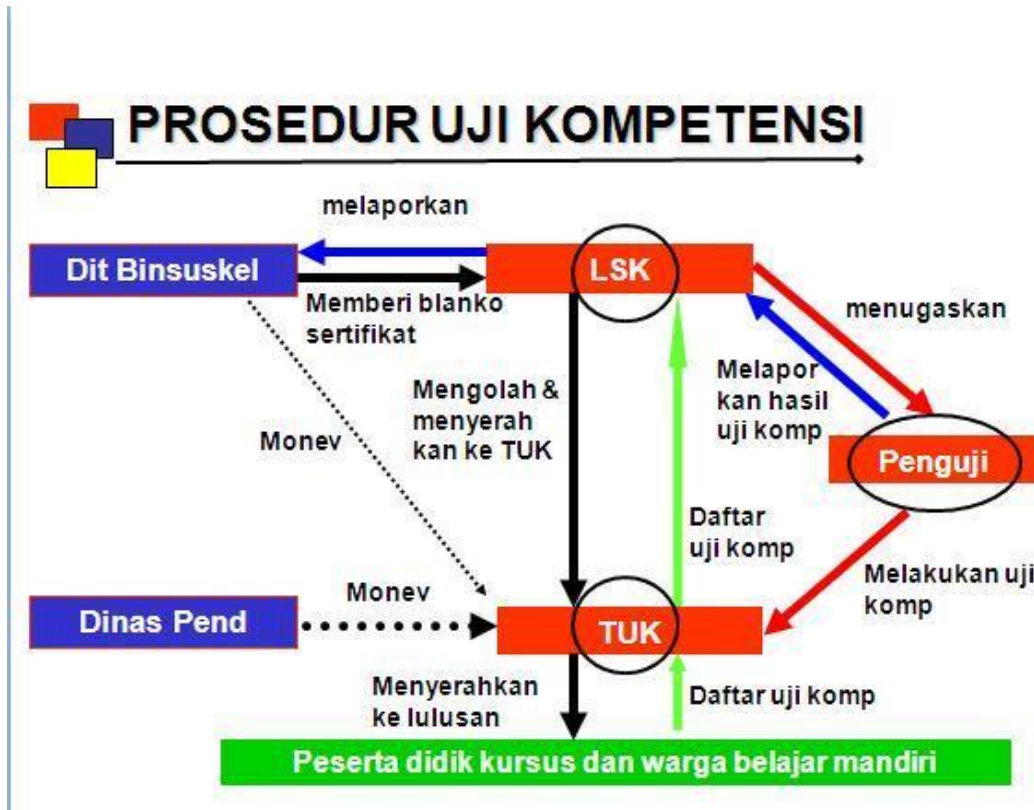
Rendah nya kompetensi lulusan kursus dan pelatihan juga dapat dilihat dari berapa banyak peserta didik kursus dan pelatihan yang mengikuti ujian kompetensi . Data yang diperoleh dari Infokursus pada tahun 2007 menyatakan bahwa Penyelenggaraan ujian kursus dapat dibedakan menjadi (4) empat macam yaitu ujian lokal/lembaga (79,50%), ujian nasional (17,50%), ujian internasional (1,79%) dan ujian kompetensi atau profesi (1,21%). Dari keempat jenis ujian tersebut berhasil meluluskan sebanyak 798.845 atau (90,14%), ujian nasional 78.942

atau (8,91%) dan ujian internasional sebanyak 8.398 atau (0,95%).

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa proses evaluasi dalam program kursus dan pelatihan dilalui melalui tahap ujian di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Untuk mengejar standar mutu, uji kompetensi bagi peserta didik sangat penting, sebagai tanda penghargaan atas kemampuan yang dimilikinya. Seperti dijelaskan di dalam UU No 20, Tahun 2003, pasal 61 ayat 3: Sertifikasi kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Sayangnya masih sedikit peserta kursus yang mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu. Uji kompetensi diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) sejak tahun 2009. LSK adalah lembaga mandiri yang dibentuk oleh organisasi atau asosiasi profesi yang diakui Pemerintah. Tempat uji

kompetensi (TUK) adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan non-formal lain atau lembaga yang telah dinilai, diverifikasi, dan ditetapkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) untuk menyelenggarakan uji kompetensi. Untuk dapat mengikuti uji kompetensi satuan pendidikan mendaftarkan peserta kursus yang sudah menyelesaikan pendidikan & pelatihannya kepada LSK. Alur tersebut tergambar seperti berikut :



Bagan 1. Prosedur Uji Kompetensi
 Sumber: www.infokursus.net (diakses 28/03/17)

Terbatasnya TUK menjadi kendala bagi peserta didik untuk dapat mengikuti uji kompetensi. Berdasarkan data dari sistem informasi eksklusif Direktorat Binsuslat hanya terdapat 1146 TUK yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedikitnya lulusan kursus dan pelatihan yang mempunyai sertifikat kompetensi membuat lulusan tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya lulusan kursus dan pelatihan hanya mampu menyumbang angka pengangguran di Indonesia. (BPS: Pengangguran Terbuka di Indonesia Capai

7,02 Juta Orang, 2016) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 mencapai 7,02 juta orang atau 5,5 persen. SKB sebagai salah satu satuan pendidikan non-formal yang salah satu fungsinya menyiapkan tenaga kerja, dituntut mampu menghasilkan lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh dunia kerja. Dunia kerja membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaannya, memiliki daya adaptasi dan daya saing yang tinggi. Atas

Nanang Kristanto

dasar itu, SKB harus menyuguhkan layanan pembelajaran yang berkualitas. selama ini SKB maupun satuan pendidikan non-formal lainnya dalam menyelenggarakan kegiatan kursus dan pelatihan menggunakan kurikulum yang telah disusun oleh direktorat Pembinaan Kursus dan pelatihan. Kurikulum yang selama ini disusun oleh direktorat adalah kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Seperti yang tertuang dalam UU sisdiknas Pasal 6 ayat 3 “satuan pendidikan non-formal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat kecakapan hidup dan ketrampilan”. Pada dasarnya kurikulum yang ada disetiap jenis kursus bersifat nasional. Namun sampai tahun 2017 baru 76 jenis kursus dengan berbagai jenjang baru disyahkan dan dibuat oleh pemerintah. Hal tersebut membuat satuan pendidikan non-formal mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan kursus yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri apabila belum ada kurikulum yang dibuat atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Dari pernyataan tersebut dapat dicari solusi tentang bagaimana mengembangkan LKP yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, khususnya melalui kurikulum.

Kurikulum mempunyai kedudukan yang sentral dalam seluruh proses pendidikan, begitu juga dalam proses kursus dan pelatihan pada LKP. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Menurut Mauritz jhonson (1967, hal.130) kurikulum “*prescribe (or at last anticipates) the result of instruction.* Kurikulum juga merupakan suatu rencana pendidikan memberikan pedoman dan pegangan tentang jenis lingkup dan urutan isi serta proses pendidikan. Kurikulum yang sudah disyahkan oleh pemerintah sayangnya tidak semuanya mampu mengimbangi perkembangan perubahan kebutuhan, hal tersebut yang membuat lulusan kursus dan pelatihan tidak mampu bersaing.

Mengingat jenis kursus sangat bervariasi, maka dalam penelitian ini akan mengambil jenis kursus berdasarkan banyaknya lulusan yang masih menunggun penempatan. Berikut data 10 jenis kursus berdasarkan kelulusannya.

Tabel 2. 10 Jenis Kursus Berdasarkan Kelulusannya

No	Jenis Ketrampilan	Proses Diklat		Bekerja		Berwirausaha		Menunggu Penempatan		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Komputer	4183	4919	12472	13803	1952	1524	13351	18207	70411
2	Mengemudi	282	196	1666	827	228	121	3121	2237	8678
3	Bahasa Inggris	1216	1574	1143	1185	131	92	2269	3000	10610
4	Menjahit	36	675	858	7002	218	4367	121	1603	14880
5	Otomotif	367	2	2151	11	801	5	1333	36	4706
6	Akuntansi	146	531	401	1488	6	34	171	520	3297
7	Perhotelan	853	626	1539	1051	32	11	187	112	4411
8	Elektronika	32	3	253	33	436	52	201	23	1033
9	Tata Kecantikan Rambut	6	130	33	753	44	999	28	189	2182
10	Spa	13	284	135	1274	7	216	16	292	2237

(data diolah dari infokursus.net)

Nanang Kristanto

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa kursus dan pelatihan komputer menjadi jenis ketrampilan dengan jumlah peserta didik terbanyak yang sedang menunggu penempatan. Sehingga jenis kursus yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah kursus dan pelatihan komputer.

Banyaknya lulusan kursus dan pelatihan komputer yang menunggu penempatan menunjukkan lulusan kursus dan pelatihan komputer belum memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan, serta banyaknya lulusan yang tidak mengikuti uji kompetensi melalui TUK, sehingga lulusan tidak mempunyai sertifikat kompetensi yang diakui secara nasional menyebabkan lulusan kursus tidak mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Selama ini lulusan kursus banyak berasal dari LKP, yang pada kenyataannya mereka lulus mengikuti ujian pada tingkat lokal, yaitu ujian yang diselenggarakan oleh lembaga, namun mereka tidak mengikuti uji kompetensi di tempat TUK. Dalam hal ini LKP sudah gagal mengantarkan peserta didik lulus berkompeten serta mempunyai sertifikat kompetensi. Dengan adanya SKB menjadi satuan pendidikan non-formal yang baru, Maka peneliti ingin membuat desain kurikulum yang mampu meningkatkan mutu lulusan kursus dan pelatihan , sehingga mereka berkompeten serta mempunyai

sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi kompetensi, agar menjadi contoh lembaga pendidikan non-formal lainnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil studi pendahuluan ini maka dirumuskanlah solusi untuk mengatasi permasalahan tingginya angka pengangguran lulusan kursus komputer (aplikasi perkantoran), dari hasil studi pendahuluan didapatkan masukan masukan yang selanjutnya menjadi bahan kajian pada langkah ke dua dalam penelitian dan pengembangan (R&D). dari hasil kajian diatas maka perlu dikembangkan desain kurikulum kursus dan pelatihan komputer (aplikasi perkantoran) pada sanggar kegiatan belajar (skb) untuk meningkatkan mutu lulusan di provinsi daerah istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah dan Djam'an Satori. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Abdulhak, I (2000). *Metodologi Pembelajaran Orang Dewasa*. Bandung: Indira Alma Buchori.
- Akker, J Van Den. (2006). *Chapter 1: Principles and Methods of Development Research dalam Educational Design Research*, Arizona: Rotledge.

- Andrew E. Sikula (1981). *Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja*. Jakarta : bina pustaka. Borg Walter R., Meredith Damien Gall. 1983. *Educational Research an Introduction*. New York: Longman Inc.
- Borg, W.R.&Gall, M.D, (1989). *Educational Research: An Introduction* (5 London: Longman, Inc.Ed). New York &BPS: Pengangguran Terbuka di Indonesia Capai 7,02 Juta Orang.(2016, Mei). Kompas Rabu, 4 Mei 2016 18:49 WIB, from : <https://nasional.tempo.co>
- Deming, W. Edwards. 1982. *Guide to Quality Control*. Cambirdge: Massachussetts Institute Of Technology.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Pedoman Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup (Life Skill) Pendidikan Non Formal*. Jakarta: Dirjen Diklusepa.
- Direktorat Kursus dan kelembagaan(2010). From : www.infokursus.net
- Dirjen PAUD dan DIKMAS.(2015).Saatnya Lembaga Kursus Berbenah.(2015, Mei). Harian sore Sinar Harapan, [22 Mei 2015](http://scholae.co), from: <http://scholae.co>.
- Edward Sallis, 2006. *Total Quality Management in Education*. Jogjakarta:IRCiSoD
- Edward Sallis. 2008. *Total Quality Management In Education* (alih Bahasa Ahmad Ali Riyadi). Jogjakarta : IRCiSoD.
- Eisner, E. W., Vallance, E. (1974). Five conceptions of curriculum: Their roots and implications for curriculum planning. In E. W. E. Vallance (Ed.), *Conflicting Conceptions of Curriculum* (pp. 1-18). Berkley, PA: McCutchan Publishing.
- Hamalik, O. (2007). *Dasar-dasar pengembangan kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Hamalik, Oemar. (1993). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hugh Barr.(2000). Designing and Developing a Constructivist National Social Studies Curriculum: An Example from New Zealand. *Children's Social And Economics Education* Vol. 4, No. 1.
- Juran, J.M. (1992). *Juran Quality By Design*, New York: Free Press
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.(2013). *Analisis Mutu Kursus* Disusun oleh: Bidang Pendayagunaan dan Pelayanan Data dan Statistik Pendidikan. – Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud, 2013
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0206/ O/ 1978 tanggal 23 Juni 1978* tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar.
- McNeil, J.D. (2006). *Contemporary Curriculum In Thought and Action – Sixth Edition*. New Jersey: Willey Jossey-Bass Education.
- Munthe, B. (2009). *Desain Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani

- Ornstein, Allan C. & Francis P. Hunkins. (2009) *Curriculum: Foundations, principles, and Issues*. Edisi ke-5. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Peraturan Dirjen PAUD dan Dimas No 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Model Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat.
- Peraturan Dirjen PAUD dan Dimas Nomor 1453 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri.
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.*
- Permendikbud No 131 tahun 2014 tentang standar kompetensi lulusan kursus dan pelatihan. Permendikbud No 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal.
- Ravi, V. (2016). *Curriculum Development*. Slapur: Laxmi Book Publication
- Riduwan dan Kuncoro. 2007. *Cara Menggunakan dan Memaknai Analisis Jalur (Path Analysis)*. Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, Wina. *Kurikulum Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet, 3, 2008.
- Saylor J. Glan; Alexander, William M; dan Lewis, Artur J. (1981). *Curriculum Planing for batter Teaching and Learning*, New York, Rinehartand Wiston.
- Schuler. Randall S. (1987). *Personel and Human Resource Management*, Third edition, New York: West Publishing Company.
- Schuller, Randall. (1997). *Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad ke 21*. Jakarta: Erlangga.
- Soetomo, S. et al. (1988). *Pengembangan Kursus*. Kerjasama Universitas Terbuka dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.
- Sowiyah. 2010. *Pengembangan Kompetensi Guru SD*. Lampung: Lemlit UNILA.
- Suhardan, D., Riduwan, & Enas. 2012. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana, 2010, *Pengembangan kurikulum teori dan peraktek*. Bandung: Kusuma Karya
- Threfall, Mike. *Planning Across the Curriculum. dalam Kate Ashcroft and David Palacio. Implementing the Primary Curriculum, A Teachers Guide*. Washington DC: The Falmer Press, 1997.
- Undang-Undang No 22 Tahun 1999.

Nanang Kristanto

Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Sisdiknas). Jakarta: Sinar Grafika.

Wills, Mike. (1993), *Managing the
Training Process: Putting the
Basies Into Practice*, London: Mc.
Graw Hill Book company Europe.

Zais, Robert S. (1976). *Curriculum:
Principles and Foundations*. New York:
Harper & Row. Publisher.